

ABSTRAK

Implementasi Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital melalui Aplikasi Siwaslu oleh Bawaslu pada Pemilu 2024 di Provinsi Lampung

Oleh

Muhammad Reza Zidan

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus diselenggarakan secara demokratis, jujur, dan adil. Dalam rangka memperkuat pengawasan pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengembangkan pengawasan partisipatif berbasis digital melalui aplikasi Siwaslu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi Siwaslu sebagai sarana pengawasan partisipatif digital oleh Bawaslu pada Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Lampung serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan dengan melibatkan informan dari jajaran Bawaslu dan pihak-pihak terkait dalam pengawasan pemilu. Analisis data dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan Jan Merse yang meliputi aspek informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Siwaslu di Provinsi Lampung telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih dominannya laporan pengawasan melalui kanal non-digital dibandingkan dengan penggunaan aplikasi Siwaslu. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan literasi digital pengawas dan masyarakat, kendala teknis aplikasi dan jaringan internet, serta perbedaan kesiapan wilayah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan infrastruktur guna meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif berbasis digital.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Digitalisasi, Pengawasan Partisipatif.

ABSTRACT

Implementation of Digital-Based Participatory Supervision through the Siwaslu Application by Bawaslu in the 2024 Election in Lampung Province

By

Muhammad Reza Zidan

Elections are a means of exercising popular sovereignty that must be conducted in a democratic, honest, and fair manner. To strengthen election supervision, the Election Supervisory Body (Bawaslu) introduced digital-based participatory supervision through the Siwaslu application. This study aims to analyze the implementation of the Siwaslu application as a digital participatory supervision tool by Bawaslu in the 2024 General Election in Lampung Province and to identify the challenges encountered in its implementation. This study employed a qualitative research method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, documentation, and literature review involving Bawaslu officials and other stakeholders engaged in election supervision. Data analysis was conducted using Jan Merse's policy implementation theory, which includes aspects of information, policy content, public support, and resource distribution. The findings indicate that the implementation of the Siwaslu application in Lampung Province has been carried out but has not yet been fully optimized. This is reflected in the dominance of election supervision reports submitted through non-digital channels compared to those reported via the Siwaslu application. The main challenges include limited digital literacy among supervisors and the public, technical issues related to the application and internet access, and differences in regional readiness. Therefore, strengthening socialization, human resource capacity, and infrastructure support is essential to improve the effectiveness of digital participatory supervision.

Keywords: *Policy Implementation, Digitalization, Participatory Supervision.*